



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK Ceko MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON EXEMPTION OF VISA
REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan/atau paspor dinas dari Republik Ceko;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic or Service Passports*) pada tanggal 25 Februari 2016 di Jakarta, Indonesia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic or Service Passports*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic or Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2016 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic or Service Passports*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Ceko, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

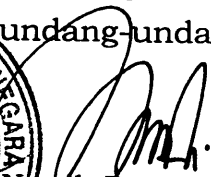
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Nani M. Moesono



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko,
(selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"),

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Republik Indonesia pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, dapat masuk, keluar, tinggal dan transit di wilayah Republik Ceko tanpa visa dan biaya untuk jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu maksimum untuk kunjungan singkat yaitu sembilan puluh (90) hari dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sesuai dengan *Schengen acquis*.

2. Warga Negara Republik Ceko, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, dapat masuk, keluar, tinggal dan transit di wilayah Republik Indonesia tanpa visa dan biaya untuk jangka waktu yang tidak lebih dari tiga puluh (30) hari.

PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor diplomatik atau paspor dinas dari warga Negara Para Pihak wajib setidaknya enam (6) bulan pada saat memasuki wilayah dari Pihak lain.

PASAL 3

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU POS KONSULER

1. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler serta perwakilan organisasi internasional, yang bertempat di wilayah Pihak lain, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai sebelum memasuki wilayah Pihak lain tersebut.
2. Ketentuan dalam Ayat 1 dari Pasal ini wajib juga berlaku untuk anggota keluarga yang merupakan bagian dari rumah tangga orang yang disebutkan dalam ayat tersebut, yang merupakan warga negara dari masing-masing Pihak dan merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas.

PASAL 4
SYARAT MASUK DAN KELUAR

Warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini dapat masuk ke wilayah Negara Pihak lain melalui titik-titik perlintasan batas yang diperuntukkan bagi lalu lintas perjalanan internasional.

PASAL 5
HAK PIHAK YANG BERWENANG

1. Masing-masing Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek periode masa tinggal di dalam wilayahnya kepada warga negara Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini, yang kehadirannya tidak kehendaki.
2. Tanpa mengurangi hak dan kekebalan diplomatik yang dimiliki, warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini wajib untuk menghormati peraturan perundang-undangan nasional Pihak lain selama tinggal di wilayah Pihak lain tersebut.

PASAL 6
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah, jika dianggap perlu, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan dimaksud akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan paragraf 1 dari Pasal 10 Persetujuan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 7
PENUNDAAN

1. Masing-masing Pihak berhak menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian, pemberlakuan dari Persetujuan ini karena alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.
2. Para Pihak wajib saling memberitahukan mengenai pemberlakuan atau pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam paragraf 1 dari Pasal ini dengan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik dalam waktu setidaknya-tidaknya tujuh puluh dua jam (72) jam sebelum pemberlakuan kebijakan tersebut.

PASAL 8
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN
PERJALANAN

1. Kedua belah pihak wajib bertukar specimen paspor diplomatik dan dinas mereka yang merujuk pada Pasal 1 dari Persetujuan ini melalui saluran diplomatik, dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari dari berlakunya Persetujuan ini.
2. Apabila paspor diplomatik dan dinas yang sah merujuk pada Pasal 1 dari Persetujuan ini diubah atau dimodifikasi, masing-masing Pihak wajib mengirimkan kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, spesimen dari paspor diplomatik atau dinas yang baru atau telah di modifikasi, termasuk penjelasan rincinya, setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum pemberlakuannya.

3. Dalam hal paspor diplomatik atau dinas warga negara masing-masing Pihak hilang atau rusak di dalam wilayah Pihak lain, mereka wajib memberitahukan secepatnya kepada otoritas yang berwenang di negaranya melalui misi diplomatik atau pos konsuler dari negara kebangsaan mereka. Misi diplomatik atau pos konsuler yang berkepentingan wajib menerbitkan kepada orang-orang tersebut, sesuai dengan undang-undang negara mereka, dokumen untuk kembali ke negara kebangsaan mereka.

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap pelaksanaan atau penerapan dari ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 10

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan wajib mulai berlaku tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Salah satu Pihak dapat setiap saat mengakhiri Persetujuan ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik. Dalam keadaan demikian, Persetujuan ini wajib berakhir masa berlakunya enam puluh (60) hari setelah Pihak lain menerima pemberitahuan mengenai pengakhiran tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Februari tahun 2016, dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Ceko dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK CEKO**



LUBOMÍR ZAORÁLEK
MENTERI LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

**DOHODA MEZI
VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
O ZRUŠENÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE DIPLOMATICKÝCH
ČI SLUŽEBNÍCH PASŮ**

Vláda Indonéské republiky a vláda České republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“),

S PŘÁNÍM posilovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,

V SOULADU se zákony a předpisy platnými v příslušných státech,

SE DOHODLY takto:

ČLÁNEK 1

OSVOBOZENÍ OD VÍZOVÉ POVINNOSTI

1. Občané Indonéské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických či služebních pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřesahující maximální povolenou dobu pro krátkodobý pobyt činící devadesát (90) dní v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dní podle schengenského acquis.

2. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických či služebních pasů, mohou vstupovat na území Indonéské republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující třicet (30) dní.

ČLÁNEK 2

DOBA PLATNOSTI PASU

Doba platnosti diplomatického či služebního pasu občanů smluvních stran musí být v den vstupu na území státu druhé smluvní strany nejméně šest (6) měsíců.

ČLÁNEK 3

VÍZA PRO ČLENY DIPLOMATICKÝCH MISÍ ČI KONZULÁRNÍCH ÚŘADŮ

1. Občané státu kterékoliv ze smluvních stran, kteří jsou držitelé platných diplomatických či služebních pasů a kteří jsou přiděleni jako členové diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé smluvní strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum.
2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států smluvních stran a držiteli platných diplomatických či služebních pasů.

ČLÁNEK 4

PODMÍNKY VSTUPU A VÝSTUPU

Občané uvedení v článku 1 této dohody mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na všech hraničních přechodech pro mezinárodní dopravu.

ČLÁNEK 5

PRÁVA ÚŘADŮ

1. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé smluvní strany, kteří jsou uvedeni v článku 1 této dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.
2. Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé smluvní strany jeho vnitrostátní zákony.

ČLÁNEK 6

ZMĚNY

Tato dohoda může být v případě nutnosti pozměněna po vzájemném písemném souhlasu smluvních stran. Taková změna vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 článku 10 této dohody a bude tvořit její nedílnou součást.

ČLÁNEK 7

POZASTAVENÍ

1. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo dočasně zcela či částečně pozastavit provádění této dohody z důvodů národní bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku či veřejného zdraví.
2. Obě smluvní strany se budou vzájemně písemně diplomatickou cestou informovat o zavedení či ukončení opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku nejméně sedmdesát dva (72) hodin před vstupem v platnost takového opatření.

ČLÁNEK 8

VZOR A VYDÁVÁNÍ PASŮ ČI CESTOVNÍCH DOKLADŮ

1. Obě smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory svých diplomatických a služebních pasů uvedených v článku 1 této dohody do třiceti (30) dní po vstupu této dohody v platnost.
2. Pokud budou platné diplomatické či služební pasy uvedené v článku 1 této dohody změněny či pozměněny, předá každá smluvní strana druhé smluvní straně diplomatickou cestou vzory svých nových či pozměněných diplomatických či služebních pasů společně s jejich podrobných popisem nejméně třicet (30) dní před jejich zavedením.
3. Pokud občan kterékoliv ze smluvních stran ztratí či poškodí svůj diplomatický či služební pas na území státu druhé smluvní strany, informuje neprodleně úřady svého státu prostřednictvím diplomatické mise či konzulárního úřadu svého státu. Příslušná diplomatická mise či konzulární úřad vydá v souladu se zákony svého státu výše uvedené osobě doklad umožňující návrat do státu, jehož je občanem.

ČLÁNEK 9

UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

Jakékoliv rozdíly či spory plynoucí z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody budou řešeny smírně konzultacemi či jednáním obou smluvních stran diplomatickou cestou.

ČLÁNEK 10

VSTUP V PLATNOST, TRVÁNÍ A UKONČENÍ

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet (30) dní po dni, kdy bylo diplomatickou cestou doručeno poslední písemné oznámení smluvních stran o dokončení jejich vnitrostátních právních postupů nutných pro vstup této dohody v platnost.
2. Každá se smluvních stran může kdykoliv tuto dohodu ukončit písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou. V takovém případě skončí platnost této dohody šedesát (60) dní po doručení takového oznámení druhé smluvní straně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, byvše k tomu řádně pověřeni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno V Jakartě dne 25. února roku 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v indonéském, českém, a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu ustanovení této dohodu má přednost anglické znění.

**Za vládu
Indonéské republiky**



Retno L. P. Marsudi
**Ministryně zahraničních věcí
Indonéské republiky**

**Za vládu
České republiky**



Lubomír Zaorálek
**Ministr zahraničních věcí
České republiky**



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC
ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic, (hereinafter referred to as **"the Parties"**),

DESIRING to strengthen the friendly relations between the two countries;

PURSUANT to laws and regulations in force in the respective state;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia holding valid diplomatic or service passports, may enter in, exit from, stay in and transit through the territory of the Czech Republic without entry visas and fees for a period not exceeding the maximum allowed period of a short – term stay of ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) day period pursuant to the Schengen acquis.

2. Nationals of the Czech Republic holding valid diplomatic or service passports, may enter in, exit from, stay in and transit through the territory of the Republic of Indonesia without visas and fees for a period not exceeding thirty (30) days.

ARTICLE 2

DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of diplomatic or service passport validity of nationals of the Parties shall be at least six (6) months on the day of entry into the territory of the State of the other Party.

ARTICLE 3

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSION OR CONSULAR POSTS

1. Nationals of the State of either Party, who are holders of valid diplomatic or service passports and who are assigned as members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organisations, located in the territory of the State of the other Party, shall be required to obtain appropriate entry visa prior to their entry.
2. Paragraph 1 of this Article shall apply also to the family members forming part of the household of the persons specified in that paragraph who are nationals of the respective States of the Parties and holders of valid diplomatic or service passports.

ARTICLE 4
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals referred to in Article 1 of this Agreement may enter the territory of the State of the other Party through all border crossing points opened for international traffic.

ARTICLE 5
RIGHTS OF AUTHORITIES

1. Each of the Parties reserves the right to refuse entry or to reduce period of stay on the territory of its State to the nationals of the State of the other Party specified in Article 1 of this Agreement, whose presence is undesirable.
2. Without prejudice to their diplomatic privileges and immunities, nationals referred to in Article 1 of this Agreement shall be obliged to observe the national legislation of the other Party's State when residing on its territory.

ARTICLE 6
AMENDMENTS

This Agreement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 7
SUSPENSION

1. Each Party reserves the right to temporarily suspend, in whole or in part, the implementation of this Agreement for reasons of national security, protection of public order or public health.
2. Both Parties shall inform each other about the introduction or termination of such measures under paragraph 1 of this Article by a written notification through diplomatic channels within at least seventy two (72) hours prior to the entry into force of such measure.

ARTICLE 8
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL
DOCUMENTS

1. Both Parties shall exchange the specimens of their diplomatic and service passports referred to in Article 1 of this Agreement through diplomatic channels, within thirty (30) days of the entry into force of this Agreement.
2. If valid diplomatic or service passports referred to in Article 1 of this Agreement are changed or modified, each Party shall also transmit to the other, through diplomatic channels, specimens of its new or modified diplomatic or service passport, including its detailed description, at least thirty (30) days before their introduction.

3. In case of nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the State of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of their State through diplomatic mission or consular posts of their nationality. The diplomatic mission or consular posts concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their State, a document for returning to the State of their nationality.

ARTICLE 9

SETTLEMENT OF DISPUTE

Any differences or disputes arising out of the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by means of consultations or negotiations between both Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 10

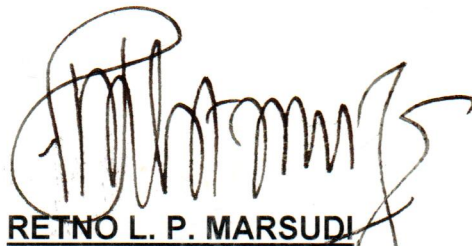
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement has been concluded for an indefinite period of time and shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt through diplomatic channels of the last written notification on completion by the Parties of their internal legal procedures, necessary for its entry into force.
2. Each Party may at any time terminate this Agreement by written notification to the other Party through diplomatic channels. In such a case the Agreement shall cease to be in force sixty (60) days after the other Party has received the notification thereof.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on this 25th day of February in the year 2016 in two originals in Indonesian, Czech, and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
CZECH REPUBLIC**



LUBOMÍR ZAORÁLEK

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS